

**Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
dalam Menanggulangi Banjir di Desa Niaso Muaro Jambi**

Yusuf Falaq
IAIN Kudus, Kudus, Indonesia
yusuffalaq@iainkudus.ac.id

Mifthatul Rahmawaty Jannah
IAIN Kudus, Kudus, Indonesia
miftahulrahmawatyjannah@gmail.com

Riska Rohmatunnisa
IAIN Kudus, Kudus, Indonesia
riskarohmatunnisa@gmail.com

Abstract

This study focuses on disaster management conducted by the regional disaster management agency Niaso Village Muaro Jambi, whether it is in accordance with the stages of disaster management that is pre-disaster, during the disaster, and post disaster. So this research is to find out how the disaster management conducted by regional disaster management agency Niaso Village Muaro Jambi in handling the flood disaster. The research method used in this research is qualitative method of descriptive type, with staff as an informant from regional disaster management agency Niaso Village Muaro Jambi which has duty to conduct disaster management in Niaso Village Muaro Jambi. The results showed that the stages of disaster management carried out BPBD Niaso Village Muaro Jambi is starting from pre-disaster that there are still shortcomings that is not the formation of contingency plans, then in the stage when there is a disaster that is lack of logistics and disaster emergency personnel, and the last stage is post-disaster there are still shortcomings where the form of rehabilitation conducted BPBD there are still less appropriate target.

Keywords: Management; Disaster; Floods

Abstrak

Bencana yang paling sering terjadi di banyak kota di Indonesia adalah bencana banjir, sehingga diperlukan penanggulangan bencana untuk meminimalkan risiko akibat banjir. Studi ini berfokus pada penanggulangan bencana yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Desa Niaso Muaro Jambi, apakah sesuai dengan tahap penanggulangan bencana pra bencana, pasca bencana, dan pasca bencana. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penanggulangan bencana yang dilakukan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Desa Niaso Muaro Jambi dalam penanganan bencana banjir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif jenis deskriptif, dengan staff sebagai informan dari badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Desa Niaso Muaro Jambi yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana di Desa Muaro Jambi. Hasil menunjukkan bahwa tahap penanggulangan bencana yang dilaksanakan BPBD Desa Niaso Muaro Jambi dimulai dari pra bencana masih ada kekurangan bukan pembentukan rencana kontinjensi, lalu dalam tahap lackaster itu ada ketentuan bencana dan anggota darurat bencana, dan tahap terakhir pasca bencana masih ada kekurangan mana bentuk rehabilitasi yang dilakukan BPBD masih kurang tepat.

Kata kunci: Manajemen; Bencana; Banjir

A. Pendahuluan

Kondisi geografis daerah kota dan kabupaten di Indonesia yang beragam mulai dari suatu daerah yang terletak di dataran tinggi, dataran rendah, namun juga ada suatu daerah yang memiliki dataran rendah dan juga dataran tinggi. Kondisi tersebut yang menyebabkan Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi bencana alam yang tinggi. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia seperti gunung meletus, banjir dan rob, tanah longsor, gempa bumi, hingga yang paling ekstrem adalah gelombang tsunami.

Potensi penyebab bencana di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu karena faktor alam, perbuatan manusia, dan sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, kekeringan kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana buatan manusia antara lain berupa kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, dampak industri, bom nuklir, pencemaran lingkungan seperti polusi udara, polusi air sungai, dan lain sebagainya. Bencana sosial terjadi karena rusak dan kurang harmonisnya hubungan antar sosial

antar anggota masyarakat yang disebabkan berbagai faktor baik sosial, budaya, suku atau ketimpangan sosial:

Bencana alam yang sering sekali melanda banyak daerah di Indonesia yaitu banjir. Banjir merupakan bencana alam yang sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka masyarakat di kota yang berada di pesisir pantai. Kota yang berada di pesisir pantai biasanya kerap sekali terjadi bencana banjir. Hal ini disebabkan karena dua hal yaitu antara perbuatan manusia atau memang benar-benar merupakan bencana dari alam. Banjir yang atas perbuatan manusia adalah akibat dari ulah masyarakat yang tidak bisa menjaga lingkungannya dengan baik. Sebagai contoh adalah kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke sungai, hal ini yang ternyata masih kurang diperhatikan oleh masyarakat bahwa mereka belum paham mengenai akibat dari kebiasaan mereka jika membuang sampah ke sungai. Bencana alam dapat terjadi di manasaja, termasuk di Desa Niaso Muaro Jambi. Provinsi Jambi memiliki letak geografis yang menarik yaitu memiliki Sungai yang langsung menuju ke dermaga, hal ini sangat jarang sekali ditemukan oleh kota-kota lain di Indonesia.

Bencana banjir yang terjadi di Desa Niaso Muaro Jambi tiap tahunnya ini merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh warga Desa Niaso Muaro Jambi dan juga Pemerintah Provinsi Jambi. Akibat dari bencana banjir inilah yang merugikan masyarakat Desa Niaso Muaro Jambi baik dari sisi materiil dan psikologis. Secara materiil warga yang terkena bencana banjir tiap tahunnya harus kehilangan harta bendanya, dan secara psikologis akan berdampak juga pada masyarakat bahkan hingga menewaskan seseorang dalam jumlah yang tidak sedikit. Dampak psikologis yang membuat pikiran dan hidup warga yang sering terkena bencana banjir menjadi tidak tenang. Karena setiap kali hujan deras dalam waktu yang lama, mereka pun was-was terhadap akibat dari hujan apakah akan datang banjir atau tidak. Ketidaktenangan perasaan warga inilah yang merugikan mereka, karena warga juga berhak mendapat ketenangan dalam hidupnya.

B. Pembahasan

1. Manajemen Bencana oleh BPBD Jambi dalam Menanggulangi Bencana Banjir

a. Tahap Pra Bencana Mitigasi

Mitigasi merupakan salah satu dari tahapan manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi dimana merupakan tahapan yang pertama dilakukan. Pada tahap pra- bencana mitigasi ini adalah tugas yang dilakukan oleh Bidang I yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Jambi. Sesuai dengan tahapan pra-bencana yaitu mitigasi, maka dapat dilihat dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jambi yaitu: Membentuk kelurahan siaga bencana dan kelurahan tangguh bencana Dalam rangka mengurangi risiko dampak bencana banjir yang terjadi, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi membentuk Kelurahan Siaga Bencana (KSB) dan Kelurahan Tangguh Bencana (Bevola Kusumasri 2014, 78). Pembentukan KSB dan KTB ini merupakan langkah yang diambil oleh Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat yang berada di daerah rawan akan bencana banjir agar dapat mengantisipasi apabila terjadi banjir.

Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) dan Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) di Desa Niaso Muaro Jambi tersebut melibatkan banyak pihak yaitu warga masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi, Aparatur Sipil Negara tingkat Kelurahan, Ketua RT/RW, dan juga pihak terkait seperti relawan-relawan bencana, dan juga Organisasi Non Pemerintah. Semuanya saling terkait satu sama lain dalam rangka untuk mencegah terjadinya banjir atau paling tidak mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat banjir di suatu kelurahan berbasis masyarakat setempat.

Pembentukan KSB dan KTB tersebut merupakan perwujudan langkah manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dalam menerapkan program pra-bencana untuk menghadapi bencana banjir yang sering melanda Desa Niaso Muaro Jambi. Melalui sosialisasi yang rutin dilakukan oleh BPBD kepada KSB dan KTB, agar dapat berperan optimal dalam menghadapi bencana banjir melalui kesiapsiagaan.

1) Rencana Kontigensi

Rencana Kontigensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahan potensi disetujui bersama, untuk mencegah atau menanggulangi secara baik dalam situasi darurat atau kritis. Tujuan adanya dokumen rencana kontigensi adalah sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana dalam melakukan penanggulangan bencana yang cepat dan efektif.

2) Membuat peta rawan dan risiko bencana

Peta rawan bencana dan peta risiko bencana merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi dalam rangka untuk

menghadapi kemungkinan terjadinya banjir di suatu wilayah. Peta rawan bencana sendiri merupakan peta yang dibuat dengan tujuan agar memetakan wilayah atau daerah mana saja yang rawan dan memungkinkan terdampak banjir suatu waktu. Sedangkan peta risiko bencana lebih detil dibandingkan peta rawan bencana. (Nurjanah 2012, 57).

3) Peringatan Dini

Bentuk peringatan dini dalam pencegahan dan kesiapsiagaan yang selanjutnya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi adalah dengan membuat sistem peringatan banjir di daerah-daerah yang dekat dengan sungai. Sistem peringatan yang sudah dibangun oleh Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan belum menggunakan sistem yang modern. Masih mengandalkan cara tradisional seperti masih menggunakan pengamatan secara langsung ke sungai oleh petugas atau relawan, dan juga peralatan yang digunakan masih sederhana seperti masih menggunakan pengukur tinggi debit sungai yang relatif hanya menunjukkan angka berapa ketinggian air sungai tersebut.

b. Saat Terjadi Bencana (Darurat Bencana)

1) Daya Tanggap atau Respon terhadap Bencana

Pada tahap ini terdapat langkah-langkah yang harus segera dilakukan agar kejadian bencana banjir yang terjadi tidak menimbulkan korban jiwa ataupun kerugian yang besar. Hal tersebut dapat dilihat dari daya tanggap Bidang II Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi dalam mengatasi keadaan darurat bencana banjir di lokasi. Sesuai dengan logo BPBD yang bergambar Segitiga, dimana artinya adalah terdapat tiga pilar utama dalam penanggulangan bencana yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam pemerintah sendiri tidak hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi saja yang mempunyai peran pada saat darurat bencana banjir terjadi, melainkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya pun juga mempunyai kewajiban yang sama pada saat penanganan kedaruratan bencana, namun BPBD di sini tugasnya adalah sebagai komando, pelaksana, dan koordinator.

Ketika bencana banjir terjadi Bidang II Kedaruratan dan Logistik meresponnya dengan langkah-langkah yang sekiranya diperlukan pada saat itu juga. Sehingga penanggulangan bencana banjir oleh BPBD ketika bencana itu terjadi adalah sifatnya fleksibel. Ketika ada laporan bencana banjir terjadi di suatu tempat, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi segera bergerak mengirim personil ke lokasi kejadian untuk memastikan informasi tersebut, lalu melakukan tindakan selanjutnya. Namun ketika survei ke lokasi terjadinya bencana banjir tersebut, personil Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Jambi

sudah siap dengan segala peralatan yang dimiliki, seperti mobil Ranger, perahu karet, pelampung, HT, dan lainnya. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tim Reaksi Cepat, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi tidak menerapkannya ke dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur kedaruratan bencana banjir. Sehingga sampai saat ini BPBD dalam pelaksanaan kedaruratan bencana banjir di Desa Niaso Muaro Jambi masih menggunakan metode yang sederhana, yaitu fleksibilitas, artinya bahwa apa yang perlu dilakukan maka akan dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen bencana Bidang II Kedaruratan dan Logistik dalam menghadapi saat terjadi bencana banjir masih bersifat fleksibel dan tidak ada Standar Operasional Prosedur yang dijalankan karena memang tidak dibuat oleh Bidang II tersebut.

2) Pemberian Logistik

Selain melakukan tindakan kedaruratan pada saat terjadi bencana banjir di lokasi, Bidang II Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi juga melakukan kegiatan penunjang dari kedaruratan tadi, yaitu dengan cara pemberian logistik kepada korban bencana banjir. Pemberian logistik kepada korban bencana banjir tersebut bertujuan agar korban banjir yang berada di lokasi dapat mengungsi dengan tetap mendapatkan pasokan kebutuhan sehari-hari yang normal.

Pemberian logistik pada korban bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi harus dengan syarat yang harus dipenuhi. Setelah pihak dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi survei ke lokasi banjir, maka yang menentukan apakah akan diberi bantuan logistik atau tidak adalah bahwa kondisi tinggi genangan banjir, lalu apakah para warga masyarakat di lokasi tersebut harus mengungsi atau tidak. Apabila ketinggian banjir di lokasi tersebut sudah berada pada fase membahayakan bagi warga, maka warga akan diungsikan ke tempat yang lebih aman. (Soehatman Ramli 2011, 88).

Korban bencana yang menjadi pengungsi tersebut pastinya tidak bisa berkegiatan sehari-hari, maka dari sinilah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi memberikan bantuan logistik, yang dapat berupa makanan dan air minum, tenda darurat untuk mengungsi, dan lain sebagainya. Pemberian logistik tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi sangatlah terbatas, apabila warga masyarakat yang terkena banjir tidak terlalu parah, maka tidak diberi logistik oleh BPBD.

c. Pasca Bencana

Tahapan manajemen bencana yang selanjutnya adalah tahap pasca bencana. Setelah bencana terjadi dan proses tanggap darurat sudah dilewati, maka langkah selanjutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap pasca bencana banjir dilaksanakan oleh Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi.

1) Rehabilitasi dan rekonstruksi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana (Soehatman Ramli: 38). Dalam rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi para korban bencana banjir.

Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi ada beragam sektor yang harus dicapai. Pemulihan sektor- sektor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. sektor kesehatan
- b. sektor rekonsiliasi dan resolusi konflik
- c. sektor pemulihan sosial ekonomi masyarakat
- d. sektor keamanan dan ketertiban
- e. sektor fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan public

2) Bantuan Sosial

Program Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi selanjutnya adalah dengan cara pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial yang diberikan bukan menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi sepenuhnya, namun mereka hanya mempunyai kewenangan sebagai koordinasi, komando dan pelaksana. Dalam hal pemberian bantuan sosial ini tugas dari Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah melihat dan memastikan siap saja yang berhak untuk dapat diberi bantuan sosial.

Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah adalah bantuan kepada korban bencana meninggal dunia, korban luka dan perlu dirawat di rumah sakit, korban bencana yang

rumah/tempat usaha/kios/los mengalami kerusakan. Hanya tiga (3) jenis akibat yang dapat diberi bantuan sosial.

3) Pembiayaan

Anggaran yang ada dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi tidak dapat dikelompokkan ke dalam sub prioritas bencana tertentu, seperti bencana banjir. Artinya adalah, bahwa anggaran yang ada itu untuk mencakup seluruh kegiatan dan penanggulangan bencana apapun, baik bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan lain sebagainya. Anggaran untuk penanggulangan bencana banjir masuk ke dalam program dan kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing bidang yaitu Bidang I, Bidang II, dan Bidang III yang dimana program penanggulangan banjir dilakukan. Karena keterbatasan anggaran untuk penanggulangan bencana banjir, maka BPBD Jambi berkoordinasi dengan pihak-pihak luar yang ingin bekerja sama untuk penanggulangan banjir dengan memberikan bantuan berupa materi atau tenaga.

4) Pengawasan

Sistem pengawasan yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi ada dua jenis, yaitu pengawasan secara langsung dan juga pengawasan tidak langsung. Untuk pengawasan secara langsung dilakukan secara hierarki, maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan dari atasan kepada bawahannya. Dari kepala BPBD Jambi hingga yang berada paling bawah yaitu pegawai staf. Pengawasan dilihat dari berbagai aspek, mulai dari kedisiplinan, kinerja dan lain sebagainya. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi adalah dengan membuat laporan kinerja setiap setahun sekali, sehingga dapat dilihat kinerja yang dicapai oleh BPBD, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pelaksanaan pengawasan selama ini berdasarkan penelitian sudah dilaksanakan dengan baik, artinya tidak ada kendala yang berarti. (Nurjanah 2012, 98).

Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi dalam menanggulangi bencana banjir di Semarang yaitu sebagai berikut, pola pikir (*mindset*) masyarakat dan juga pemangku kepentingan yang masih belum satu pikiran dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi, yaitu masih rendahnya kesadaran akan pentingnya penanggulangan bencana banjir. Selain itu faktor penghambat lainnya yaitu bahwa belum terdapatnya Standar operasional pada tahapan bencana dalam melakukan manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi. Selanjutnya yaitu keterbatasan logistik yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi sehingga menyebabkan pemberian

bantuan bencana saat keadaan darurat bencana terjadi. Faktor penghambat selanjutnya adalah kurangnya personil yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi, sehingga penanggulangan bencana banjir dirasa kurang maksimal. Yang kelima adalah data informasi yang kurang akurat yang didapat dari lapangan, hal ini menyebabkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi sulit untuk menentukan program ataupun kegiatan yang akan di lakukan di masa mendatang mengenai penanggulangan bencana banjir. Faktor penghambat yang terakhir adalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi, hal ini dapat dilihat dari program rehabilitasi sektor sosial ekonomi budaya yang dirasa kurang tepat tujuannya, dan juga pada bidang II yang memiliki keterbatasan logistik dan peralatan untuk kedaruratan bencana banjir.

Faktor yang mendukung dalam manajemen bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Desa Niaso Muaro Jambi yang pertama adalah banyaknya dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak luar BPBD, seperti Organisasi Masyarakat, Komunitas Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hingga relawan-relawan yang terbentuk dari Kelurahan Siaga Bencana / Kelurahan Tangguh Bencana. Kemudian faktor pendukung yang kedua adalah keaktifan tenaga relawan pada KSB/KTB yang membantu BPBD Jambi dalam menanggulangi bencana banjir, dikarenakan personel BPBD yang sangat terbatas sehingga hal ini sangatlah membantu dari proses manajemen bencana yang dilakukan BPBD. Kemudian faktor pendukung yang ketiga adalah, terjalinnya koordinasi yang baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan manajemen bencana. Baiknya koordinasi ini membuat manajemen bencana yang dikomando oleh BPBD menjadi lancar dan bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dalam menanggulangi bencana banjir di Desa Niaso Muaro Jambi.

C. Simpulan

Manajemen bencana oleh BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Desa Niaso Muaro Jambi dilaksanakan dengan tahapan-tahapan manajemen bencana, yaitu: Perencanaan dimana pasca bencana, pada tahap ini proses yang dilakukan oleh BPBD yakni terdiri dari mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini dimana menghasilkan program seperti pembentukan KSB, pembuatan peta risiko/rawan bencana, dan juga rencana kontijensi. Kemudian Pengorganisasian dan Penggerakan, saat darurat bencana, pada tahapan ini BPBD melakukan tanggap darurat bencana, dan juga pemberian logistik kepada korban banjir. Pasca

bencana, pada tahapan ini BPBD melakukan kegiatan yakni rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut sudah dibagi masing-masing wewenangannya. Pembiayaan, tidak adanya pengkhususan dana anggaran untuk penanggulangan bencana banjir, sehingga penanggulangan banjir belum optimal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap tahapan manajemen bencana, dan juga segera untuk dapat menyelesaikan dokumen rencana kontijensi; Memaksimalkan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat; Memaksimalkan Kelurahan Siaga Bencana dan Kelurahan Tangguh Bencana dan juga pihak-pihak terkait lainnya seperti OPD dan juga pihak swasta yang dapat digunakan sebagai personil tambahan dalam penanggulangan bencana banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoilah, Anton. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Darmadi, Damai. Sukidin. (2014). *Administrasi Publik*. LaksBang PRESSindo.
- Kusumasri, Bevola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ramli, Soehatman. 2012. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.